

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA
Tenggara Barat**

Lalu Ade Gusnawan Putra

NPP. 29.1261

*Asdaf Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email: adegp1464@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): LKPD provides an overview of the financial conditions and performance of local governments that are transparent and accountable regarding the implementation of the APBD. Local Government Financial Reports (LKPD) can be interpreted as a process of collecting, processing and delivering useful information to guide decision making and at the same time to assess the performance of local organizations. The author focuses on the opinion of the Financial Audit Board (BPK) on the transparent and accountable local government financial reports (LKPD). **The purpose** of this study was to determine the strategy in maintaining Unqualified Opinion (WTP) on the Audit of the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial Reports (LKPD) of East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. **Methods:** this study uses descriptive qualitative methods that describe the actual situation that exists and then interpret each other in order to obtain the formulation and analysis of the problems raised at the time of the study. **Results:** the results or findings obtained from this study are that there are several factors that influence the regional financial and asset management agency (BPKAD) in maintaining an unqualified opinion (OWT) in the local government financial statements (LKPD) of East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. **Conclusion:** After doing the research, it is found that the Lotim Regency Government has succeeded in maintaining the opinion of the WTP.

Keywords: Strategy; Local Government Financial Reports; WTP opinion

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): LKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi yang bermanfaat untuk pedoman pengambilan keputusan dan sekaligus untuk menilai kinerja organisasi daerah. penulis berfokus pada opini badan pemeriksa keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Metode** : penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang keadaan sebenarnya yang ada dan kemudian menginterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisis tentang masalah yang dikemukakan pada saat penelitian. **Hasil** : hasil atau temuan yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (OWT) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Lombok timur provinsi nusa tenggara barat. **Kesimpulan** : Setelah dilakukan penelitian maka terdapat pemkab lotim berhasil dalam mempertahankan opini WTP.

Kata kunci: Strategi; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Opini WTP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Setiap daerah provinsi, daerah kota, maupun daerah kabupaten dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Pada era reformasi sekarang ini, setiap entitas, termasuk pemerintah daerah diwajibkan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan secara transparan, termasuk setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah disetiap tahun anggarannya. Maka dari itu, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah tersebut. LKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tersebut, untuk itu pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Undang-undang tersebut terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan. Opini WDP

berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini TW berarti laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar informasi keuangan entitas. Sedangkan, opini TMP dikeluarkan ketika pemeriksa tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan dan tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan secara keseluruhan sudah disajikan secara wajar (pemeriksa merasa tidak independen).

Opini yang telah tertera dan disebutkan di atas, maka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi terhadap pelaporan keuangan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi yang bermanfaat untuk pedoman pengambilan keputusan dan sekaligus untuk menilai kinerja organisasi daerah BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sebelum tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2017-2020 LKPD Kabupaten Lombok Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam memastikan pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan perundang-undangan dan akuntabel. Opini WTP ini menjadi target yang wajib dicapai Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang terus bertekad dalam mempertahankan predikat ini setiap tahunnya.

Permasalahan muncul mulai tahun 2020 yaitu adanya implikasi pandemi *Covid-19* yang berdampak pada Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran. Dampak lainnya yaitu PAD menurun, kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas dipangkas, resiko timbulnya hutang atas PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) yang telah berjalan dan ditunda pembayarannya, upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terhambat (Pembatasan bepergian dan adanya kebijakan PSBB) dan sistem WFH (*work from home*) belum diadaptasi dengan baik oleh pemda.

Begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, pandemi *Covid-19* juga berdampak dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur salah satunya pada pergeseran APBD TA 2020, disebutkan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*. Tentu saja hal ini menjadi kendala

dan hambatan yang sangat signifikan bagi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP terhadap LKPD ditahun berikutnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Penelitian milik Lalu Riza Ihwandi tahun 2016 yang menemukan bahwasannya Kabupaten Lombok Timur masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun demikian telah dilakukan upaya-upaya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Penelitian berikutnya yaitu milik Heny Setyawati tahun 2017 dimana penelitian berisikan upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Bondowoso.

Kemudian beberapa strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga dilakukan oleh Kusuma Isbi Rahmadai pada tahun 2018 yang berbeda dari penelitian yang dilakukan penulis dikarenakan penulis meneliti mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Audit BPK.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Strategi Mempertahankan Opini WTP Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang akan dibahas guna mempertahankan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan tentang keadaan sebenarnya yang ada dan kemudian menginterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisis tentang masalah yang dikemukakan pada saat penelitian. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang merupakan metode berpikir dalam menyampaikan alasan yang dimulai dengan penjelasan khusus untuk menyusun suatu pendapat yang bersifat umum.

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena solusi dari permasalahan yang diteliti terhadap data-data yang dikumpulkan di lokasi penelitian, tanpa data peneliti tidak akan menemukan solusi dari permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 5 (lima) orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kepala bidang akuntansi dan kepala sub bidang akuntansi dan pelaporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah, hal ini terjadi bisa disebabkan oleh adanya koreksi-koreksi atas kesalahan maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu diadakan rekon aset antar bidang, khususnya bidang akuntansi dan bidang asset BPKAD. Pengelolaan aset yang baik akan menjadikan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersifat relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dipercaya keabsahannya. Dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memenuhi karakteristik opini WTP yaitu kesesuaian terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penulis menganalisis Strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Lombok Timur telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Lombok Timur sesuai dengan regulasi yang ada dengan menggunakan analisis SWOT rangkuti yang terdiri dari analisis internal dan eksternal. Pada analisis internal membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pada analisis eksternal membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur.

A. Faktor Internal

Faktor internal dibuat untuk mewujudkan tujuan dari penelitian tersebut sehingga dapat meningkatkan opini laporan keuangan, dan yang termasuk kedalam faktor internal yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan

Peneliti merangkum dan menghimpun berbagai macam informasi dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan observasi partisipatif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, sehingga dapat diketahui bahwa kekuatan (*strenght*) yang dimiliki oleh Badan Keuangan Kabupaten

Lombok Timur dapat diuraikan dibawah ini:

- a) Adanya kebijakan pemerintah yang melandasi dasar kinerja mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing aparatur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga memberikan kejelasan kepada masing-masing aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi kemungkinan tumpang tindih antar jabatan.
- b) Terbentuknya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- c) Adanya komitmen dari pimpinan dan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP.
- d) Adanya analisis kebenaran data sesuai fungsi dan percepatan data dengan melakukan rekonsiliasi antar bidang BPKAD Kabupaten Lombok Timur.

2. Faktor Kelemahan

Analisis kelemahan membahas tentang hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan program kerja dan tercapainya tujuan umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur. Setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan peneliti menganalisis beberapa faktor kelemahan yaitu sebagai berikut:

- a) Kuantitas sumber daya aparatur dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang akuntansi atau yang sesuai belum memadai di BPKAD Kabupaten Lombok Timur.
- b) Sistem Pengendalian Intern belum memadai
- c) Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah belum memadai seperti pemanfaatan SIMDA hanya sampai penatausahaan, sedangkan pada pelaporan masih dilakukan secara manual.
- d) Adanya revisi APBD TA 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dibuat untuk mewujudkan tujuan dari penelitian tersebut sehingga dapat meningkatkan opini laporan keuangan, dan yang termasuk kedalam faktor internal yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Peluang

Hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor yang menjadi peluang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mempertahankan opini WTP dan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya instansi/lembaga diklat dan pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi.

- b. Adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh *stakeholder* dan pimpinan masing-masing OPD dalam menyerahkan laporan keuangan tiap-tiap OPD
- c. Berkembangnya teknologi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang semakin canggih.
- d. Didapatnya Dana Intensif daerah yang didapatkan dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengembangkan sarana prasarana.
- e. Adanya panduan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada masa Pandemi Covid-19.

2. Faktor Ancaman

Hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi ancaman diantaranya :

- a. Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh OPD karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online) oleh masing-masing OPD sehingga terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan OPD itu sendiri.
- b. Banyaknya jumlah OPD
Adanya tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dari pihak pemeriksa ekstern dan lembaga KPK.

Berdasarkan tabel Matriks analisis SWOT rangkuti strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu :

a) Strategi S-O

- 1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Lombok Timur No 103 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- 2. Mendayagunakan komitmen dari setiap OPD untuk taat waktu dalam penyerahan laporan keuangan OPD sehingga tidak menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

b) Strategi S-T

- 1. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsolidasi antar bidang
- 2. Meningkatkan komitmen koordinasi setiap OPD

c) Strategi W-O

- 1. Mendayagunakan DID dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk penerapan SIMDA dan SIPD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan berbasis aktual.
- 2. Pemanfaatan lembaga diklat untuk mengembangkan SDM yang handal dalam bidang akuntansi

3. Penyesuaian penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan panduan penerapan SAP pada masa pandemic covid-19

d) Strategi W-T

1. Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern.
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

IV. KESIMPULAN

Strategi meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) antara lain yaitu mensosialisasikan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 103 Tahun 2107 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Lombok Timur, mendayagunakan komitmen dari setiap OPD untuk taat waktu dalam penyerahan laporan keuangan OPD, meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsiliasi antar bidang, meningkatkan komitmen koordinasi setiap OPD, mendayagunakan ide-ide dalam pengembangan sarana dan prasarana, pemanfaatan lembaga diklat, penyesuaian penyusunan laporan keuangan, menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern. Guna meningkatkan kualitas LKPD disarankan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada OPD, mengelola dan mendistribusikan SDM yang berkompeten secara merata, dan meningkatkan kedisiplinan pelaporan dan pencatatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Rangkuti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ilhawandi, R.L. 2016. *Analisis Terhadap Opini BPK atas LKPD Kabupaten Lombok Timur*. Jatinangor.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Sistem Informasi Strategi untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2010. *Perencanaan Strategis in Action*. Jakarta : PT.Gramedia.
- Rahmadani, K.L. Strategi Mempertahankan Opini WTP Atas Laporan Keuangan Pemda Kota Salatiga. Jatinangor.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustakka Utama.
- Salusu, J. 2007. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Setyawati, H. 2017. Strategi Pencapaian Opini WTP Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual. Jatinangor.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

